



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No.385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

2014

LAPORAN

22 JUL 2021

Kepada Yth
Melalui

Tanggal
Perihal

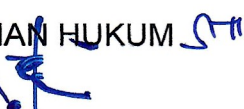
: Bupati Karanganyar
: 1. Sekretaris Daerah
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda
: 21 Juli 2021
: Laporan Hasil Konsultasi Publik Rancangan Program
Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA)
Tahun 2022.

54

DISPOSISI	URAIAN
1	2
map. uks - lmd tka - Tungkuph R. As - Tungkuph Jamil Purni Pungas 45-2022 Mbale Endang ude dispani MT 27 21 7	Dengan hormat kami laporkan hasil Konsultasi Publik Rancangan Propemperda Tahun 2022 yang diadakan secara <i>virtual meeting zoom</i> pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 09.00 WIB - selesai, sebagai berikut: ➤ Acara diikuti oleh BKD, KESBANGPOL, DISPERMADES, DISDAGNAKERKOP DAN UKM, DISHUB, DINKES, DPUPR, DPMPTSP, DLH, DISKOMINFO, BAGIAN KESRA, GAKINDO, ASPEKNAS, PERJASI, KEPALA DESA BANGSRI, DAN KETUA KOPERASI KELOMPOK TANI CARI REJEKI. - Dengan jumlah Peserta 30 orang. ➤ Konsultasi Publik Rancangan Propemperda Tahun 2022 dilaksanakan dengan Paparan Materi dari Narasumber dilanjutkan dengan Diskusi dan Tanya Jawab. ➤ Berikut adalah rincian kegiatan : 1. Pembukaan sekaligus Paparan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar dengan materi <i>Tertib Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah</i>. • Tahapan Penyusunan Propemperda yaitu dengan Inventarisasi, Seleksi, Koordinasi, Penetapan dan Penyebarluasan. • Berdasarkan Data Kinerja Propemperda Tahun 2015 – 2020 : a. realisasi tidak pernah mencapai 100 %; b. pada Tahun 2017, 2018 dan 2020 kurang dari 50 %; c. banyak Raperda diajukan pada tahun-tahun berikutnya. • Salah satu faktor kegagalan kedayagunaan dan kedayaberkuan suatu Perda adalah karena lemahnya Perencanaan. 2. Paparan dari Bpk. Joko Pramono, S.Sos. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Karanganyar dengan materi <i>Rancangan Propemperda Tahun 2022 (Legislatif), Urgensi Materi</i>. • Propemperda dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan perda tentang APBD disahkan. • Adapun tata cara penyusunan Propemperda di DPRD yaitu : a. reses dan usulan/aspirasi masyarakat (kebutuhan masyarakat); b. usulan anggota melalui Fraksi dan Komisi; c. rapat gabungan dengan Pimpinan DPRD; d. judul Rancangan Perda yang berasal dari DPRD. • Melalui Propemperda diharapkan pembentukan perda dapat terlaksana secara tertib, teratur, sistematis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas dalam pembentukan perda. 3. Paparan dari Bpk. H. Suparmi, S.E. Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Karanganyar dengan materi <i>Evaluasi terhadap proses Penyusunan Produk Hukum Daerah</i>.

- Pembentukan Perda adalah pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
 - Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan adalah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
 - Sedangkan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan adalah Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
4. Paparan dari Kepala Bagian Hukum Setda dengan materi *Rancangan Propemperda Tahun 2022 (Eksekutif), urgensi materi.*
- Dalam penyusunan Propemperda melalui Konsultasi Publik telah menjadi komitmen Pemerintahan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
 - Usulan Rancangan Propemperda tersebut merupakan Tindak Lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah.
 - Ada 16 Usulan Rancangan Propemperda Tahun 2022 yaitu :
 - BKD
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - KESBANGPOL
tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
 - DISDAGNAKERKOP DAN UKM
 - a. tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro
 - b. tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian
 - DISHUB
tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kabupaten Karanganyar
 - DISPERMDES
 - a. tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa
 - b. tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
 - DINKES
tentang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular
 - DPMPTSP
tentang Penanaman Modal
 - DLH
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - BAGIAN KESRA SETDA
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
 - DPUPR
 - a. tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. tentang Bangunan Gedung;
 - c. tentang Jasa Konstruksi;

	d. tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun; e. tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. 5. Paparan dari Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda dengan materi <i>Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP)</i>. • AKP merupakan mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan dalam rangka Program Pembentukan Peraturan Daerah yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi, dan kemampuan Daerah. • Jumlah maksimal Propemperda pada Tahun 2022 adalah 15 Raperda dengan penghitungan Jumlah Perda yang diundangkan pada Tahun 2020 ditambah 25 % kali Jumlah Usulan Propemperda Tahun 2021 jadi $13 + (25 \% \times 7) = 15$ Raperda. ➤ Diskusi/Tanya Jawab : 1. Bagian Hukum : - Masih terdapat daftar utang Propemperda Tahun 2014- 2020, apabila ada materi yang sudah diidentifikasi pada Propemperda sebelumnya mungkin bisa digabung untuk dimasukkan dalam usulan Propemperda Tahun 2022 ? - DLH : Untuk daftar utang Propemperda Tahun 2017 tentang Air Limbah karena terkait dengan anggaran yang terdampak refocusing maka belum bisa di susun, untuk LB3 bisa masuk pada usulan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sedangkan untuk Limbah Domestik masuk di DPUPR. 2. DPUPR terkait dengan daftar utang Propemperda Tahun 2020 tentang Ruang Terbuka Hijau belum menindaklanjutinya dan akan dibahas secara intern. 3. Ketua Bapemperda : DPRD akan mengajukan 2 usulan Propemperda Tahun 2022. ➤ Kesimpulan Rapat : Dari perhitungan AKP seharusnya untuk Propemperda Tahun 2022 jumlah yang diusulkan 15 Raperda sehingga akan dilakukan sinkronisasi terhadap usulan berdasarkan skala prioritas. Demikian untuk menjadikan periksa selanjutnya mohon arahan.
--	---

KEPALA BAGIAN HUKUM 

ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Tk I

NIP. 19750311 199903 1 009